



**BADAN PUSAT
STATISTIK**
Kota Jayapura



2019 / 2020 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

Kota Jayapura

Indeks Pembangunan:

- Angka Harapan Hidup
- Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata Lama Sekolah
- Kependudukan-Pendidikan
- Ketenagakerjaan-Kesehatan-Kemiskinan



2019 / 2020 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

Kota Jayapura

Indeks Pembangunan:

- Angka Harapan Hidup
- Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata Lama Sekolah
- Kependudukan-Pendidikan
- Ketenagakerjaan-Kesehatan-Kemiskinan

ISBN : 978-602-5524-42-4
Nomor Katalog : 4102002.9471
Nomor Publikasi : 9471.1801
Ukuran Buku : 14,8 X 21 Cm
Jumlah Halaman : xi+69 halaman

Naskah :
Siti Dwi Susianti, S.ST (Seksi Nerwis BPS Kota Jayapura)
Rina Retno Wati, S.ST (Seksi Statistik Sosial BPS Kota Jayapura)

Editor :
Sutiya, SE (Kepala BPS Kota Jayapura)
Elyas Prastowo, SE., M.Ec. Dev. (Seksi Nerwis BPS Kota Jayapura)

Gambar Kulit :
Tommy Setiawan (Seksi IPDS BPS Kota Jayapura)

Diterbitkan & dicetak Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Jayapura

**DILARANG MENGUMUMKAN, MENDISTRIBUSIKAN, MENGOMUNIKASIKAN, DAN/ATAU
MENGHANDAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI UNTUK TUJUAN KOMERSIAL TANPA IZIN
TERTULIS DARI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAYAPURA.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya publikasi "Indeks Pembangunan Manusia dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Jayapura Tahun 2019/2020" dapat terselesaikan.

Publikasi ini memuat indeks komposit yang mengukur pencapaian pembangunan manusia di Kota Jayapura tahun 2018/2019. Indikator-indikator yang dimuat dalam penyusunan publikasi ini diharapkan berguna bagi para perencana dalam penyusunan program dan dipakai sebagai parameter untuk mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya pembangunan manusia di wilayah Kota Jayapura.

Kami menyadari, dalam penerbitan publikasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik guna penyempurnaan penerbitan selanjutnya sangat kami harapkan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbentuknya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Jayapura, November 2020
Kepala BPS Kota Jayapura



Sutiyo, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1 Latar Belakang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...	1
1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) di Kota Jayapura.....	3
1.3 Perubahan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3
1.4 Bagaimana IPM Metode Baru Diukur ???.....	6
1.5 Perbedaan IPM Metode Lama Dan Metode Baru	7
1.6 Dampak Perubahan Metodologi IPM	7
Bab II Ruang Lingkup Dan Metode Penghitungan	9
2.1 Basis Data Pembanguna Manusia	9
2.2 Konsep Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	10
2.3 Tahapan Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	14
2.4 Kategori Peringkat Pembangunan Manusia	16
Bab III Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura	19
3.1 Situasi Indikator-Indikator Utama IPM Kota Jayapura ...	19
3.1.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	19
3.1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	21
3.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	22
3.1.4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	24

3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jayapura	25
3.3	Kecepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jayapura	28
Bab IV Analisis Situasi Pembangunan Manusia		29
4.1	Indikator Kependudukan	29
4.1.1	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga	29
4.1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	32
4.1.3	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	33
4.2	Indikator Pendidikan	33
4.2.1	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid	33
4.2.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	37
4.2.3	Angka Partisipasi Murni (APM)	39
4.2.4	Tingkat Pendidikan	41
4.2.5	Angka Putus Sekolah (APTS)	42
4.3	Indikator Ketenagakerjaan	44
4.3.1	Angkatan Kerja	44
4.3.2	Penduduk Bekerja	46
4.4	Indikator Kesehatan	48
4.4.1	Angka Morbiditas (AM)	48
4.5	Indikator Kemiskinan	50
4.5.1	Garis Kemiskinan	50
Bab V Kesimpulan dan Saran		53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Maksimum Minimum Indikator IPM	15
Tabel 2.2	Klasifikasi Capaian IPM	17
Tabel 3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Tahun 2019	28
Tabel 4.1	Rata-rata Guru dan Murid terhadap Sekolah serta Ratio Murid terhadap Guru menurut Pendidikan di Kota Jayapura, 2019	37
Tabel 4.2	Indikator Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2011-2019	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Penghitungan IPM	4
Gambar 1.2	Mengapa metode IPM diubah	5
Gambar 1.3	Yang berubah dari IPM	5
Gambar 1.4	Keunggulan IPM Metode Baru	6
Gambar 1.5	Perbedaan IPM Metode Lama dan Metode Baru ...	7
Gambar 1.6	Dampak Perubahan Metodologi IPM	7
Gambar 2.1	Rumus Penghitungan Indeks dalam IPM	15
Gambar 3.1	Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019	20
Gambar 3.2	Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019	21
Gambar 3.3	Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019	23
Gambar 3.4	Pencapaian Aktual Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019 (000 Rp)	24
Gambar 3.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2012-2019	26
Gambar 3.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Tahun 2019 ...	27
Gambar 4.1	Piramida Penduduk Kota Jayapura, Tahun 2019	30
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Kota Jayapura menurut Distrik, Tahun 2019	32
Gambar 4.3	Jumlah Sekolah di Kota Jayapura menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2019	34
Gambar 4.4	Jumlah Murid di Kota Jayapura menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2019	35
Gambar 4.5	Jumlah Guru di Kota Jayapura menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2019	36

Gambar 4.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2019	39
Gambar 4.7	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2019	41
Gambar 4.8	Sebaran Penduduk Kota Jayapura Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2019	42
Gambar 4.9	Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Jayapura menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2019	43
Gambar 4.10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jayapura Dirinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	45
Gambar 4.11	Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2019	46
Gambar 4.12	Sebaran Lapangan Usaha Pada Penduduk yang Bekerja di Kota Jayapura Tahun 2019	47
Gambar 4.13	Angka Kesakitan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kota Jayapura, 2019	49

BAB I PENJELASAN UMUM

1.1 LATAR BELAKANG INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pada awalnya konsep pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Sedangkan pembangunan itu sendiri seharusnya dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Setelah itu muncul lah konsep pembangunan manusia untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi, karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan Pendidikan.

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan

meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Namun, perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut diatas didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. *Human Development Report* (HDR) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia yaitu berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar, meliputi: Umur panjang dan

Hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*) dan Standar Hidup layak (*decent standard of living*).

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kota Jayapura Tahun 2015/2016”, disusun untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kota Jayapura, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kota Jayapura.

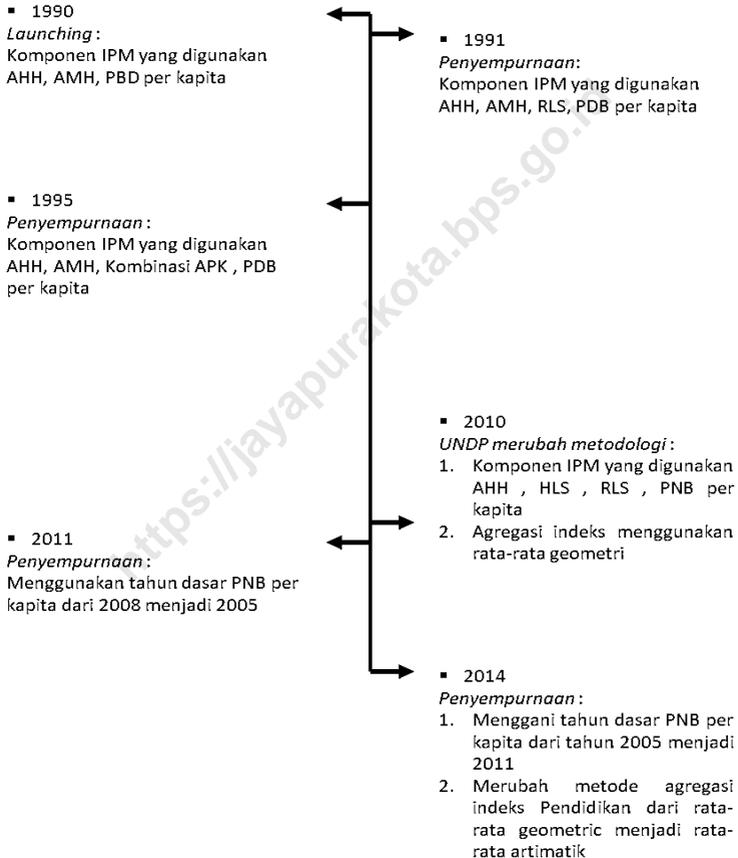
1.2 MANFAAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KOTA JAYAPURA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Kota Jayapura. IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan Kota Jayapura di Provinsi Papua dan Nasional. Serta di Indonesia, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

1.3 PERUBAHAN METODOLOGI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Dimana pada tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi untuk IPM metode baru tersebut. Perkembangan dalam penghitungan IPM dapat dilihat pada gambar berikut:

PERKEMBANGAN PENGHITUNGAN IPM



Gambar 1. 1 Perkembangan Penghitungan IPM

MENGAPA METODE IPM DIUBAH???	
Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.	
Pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMF di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antara daerah dengan baik. • Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
Kedua	Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain

Gambar 1. 2 Mengapa metode IPM diubah

YANG BERUBAH IPM	
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). • Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
Metode Penghitungan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Gambar 1. 3 Yang berubah dari IPM

KEUNGGULAN IPM METODE BARU

Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif)

- Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan, bisa mendapatkan gambaran yang lebih relevan dalam Pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM, dapat diartikan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 1. 4 Keunggulan IPM Metode Baru

1.4 BAGAIMANA IPM METODE BARU DIUKUR?

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

1.5 PERBEDAAN IPM METODE LAMA DAN METODE BARU

MENGAPA METODE IPM DIUBAH???				
Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.				
DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Hurup (AMH)	Angka Melek Hurup (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3} (I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pendapatan})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pendapatan}}$	

Gambar 1. 5 Perbedaan IPM Metode Lama dan Metode Baru

1.6 DAMPAK PERUBAHAN METODOLOGI IPM

DAMPAK PERUBAHAN METODOLOGI IPM	
Pertama	Level IPM Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama
Kedua	Peringkat IPM Terjadi perubahan peringkat IPM. Peringkat tidak bisa diperbandingkan akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi

Gambar 1. 6 Dampak Perubahan Metodologi IPM

BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

2.1 BASIS DATA PEMBANGUNAN MANUSIA

Perencanaan pembangunan manusia perlu menyadari bahwa yang berguna bagi perencanaan dan pembuatan kebijakan hanyalah data atau informasi yang memberikan gambaran keadaan sebenarnya (represent reality). Oleh karena itu perlu dipahami secara memadai jenis pengumpulan data serta kualitas data yang dikumpulkan. Perencanaan pembangunan manusia juga harus dapat memanfaatkan secara optimal data yang relevan baik yang dikumpulkan melalui sensus atau survei maupun yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, terutama instansi yang terkait dengan kesehatan, Pendidikan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, perumahan dan sanitasi, dan pengeluaran rumah tangga.

Informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan manusia dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Perencana harus menyadari bahwa kedua jenis informasi tersebut saling melengkapi atau menunjang sehingga keduanya diperlukan untuk analisis, monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long life dan*

healthy life), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dalam penyusunan publikasi “Indeks Pembangunan Manusia dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kota Jayapura Tahun 2018-2019”, data diperoleh dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun oleh BPS.

Survei tersebut merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Susenas mengumpulkan berbagai informasi seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, dan perumahan serta lingkungan.

2.2 KONSEP PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). UNDP sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur laporan tahunan perkembangan pembangunan manusia. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu; Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), dan Standar hidup layak (*decent standard of living*).

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai umur panjang dan hidup sehat. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data, UNDP memilih untuk menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir (*life expectancy at birth*). Angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, AHH sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data dan relevansi dalam mengukur pendidikan secara utuh, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah. Sebagai catatan, terdapat perubahan variabel dalam dimensi pengetahuan

jika dibandingkan dengan publikasi IPM tahun sebelumnya. Sebelumnya, penghitungan IPM menggunakan variabel Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Namun, saat ini variabel Angka Melek Huruf sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Penghitungan IPM dengan mengganti variabel Angka Melek Huruf dengan angka Harapan Lama Sekolah lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Berikut penjelasan singkat mengenai variabel Rata-rata Lama Sekolah dengan Harapan Lama Sekolah;

- Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke

atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

- Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

3. Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat

digunakan untuk mengukur unsur ini. UNDP menggunakan PNB per kapita untuk mengukur standar hidup layak. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.

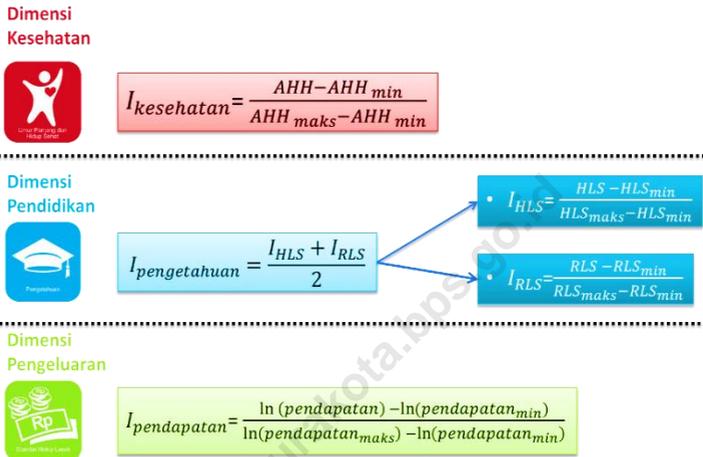
Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

2.3 TAHAPAN PERHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM penjelasannya adalah sebagai berikut:

- **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup = $I_{\text{kesehatan}}$, Pengetahuan= $I_{\text{pengetahuan}}$ dan Standar

Hidup Layak = $I_{pendapatan}$) dengan rumus seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Rumus Penghitungan Indeks dalam IPM

Tabel 2.1 Tabel Maksimum Minimum Indikator IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

- **Tahapan kedua** perhitungan IPM sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pendapatan}}$$

- **Tahap ketiga** adalah menghitung kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Berikut rumus Pertumbuhan IPM:

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPMt : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPMt-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.4 KATEGORI PERINGKAT PEMBANGUNAN MANUSIA

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tabel 2.2 Klasifikasi Capaian IPM



BAB III INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA JAYAPURA

3.1 SITUASI INDIKATOR-INDIKATOR UTAMA IPM KOTA JAYAPURA

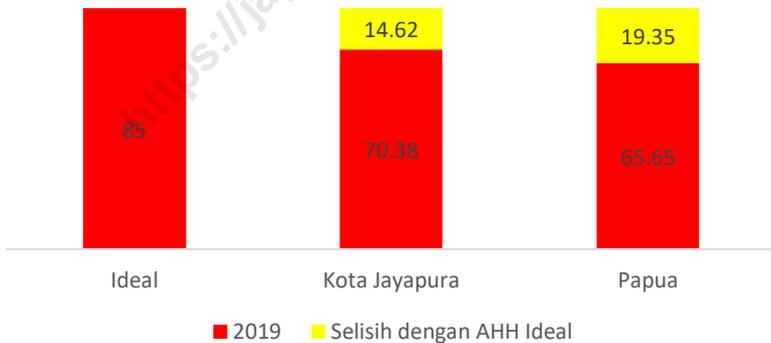
3.1.1 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Semakin tinggi AHH menunjukkan semakin tinggi kualitas fisik penduduk, sebaliknya semakin rendah AHH menunjukkan semakin rendahnya kualitas fisik di suatu wilayah. AHH yang rendah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, sosial, dan pemberantasan kemiskinan termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori.

AHH penduduk Kota Jayapura pada tahun 2019 adalah sebesar 70,38 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kota Jayapura akan bertahan hidup hingga usia 70 sampai 71 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penduduk di wilayah Kota Jayapura untuk hidup lebih lama dan sehat termasuk kategori cukup baik, dimana standar hidup paling tinggi atau ideal adalah 85 tahun. AHH Kota Jayapura tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (70,15 tahun) dan apabila

nilainya dibandingkan dengan AHH Provinsi Papua tahun 2019 yaitu 65,65 tahun maka nilai AHH Kota Jayapura juga lebih tinggi.

AHH yang tinggi mencerminkan penduduk di wilayah Kota Jayapura sudah memahami arti pentingnya hidup sehat dan adanya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, pemerintah daerah di Kota Jayapura harus terus mengupayakan agar penduduknya dapat mencapai harapan usia hidup yang lebih panjang dan sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat, serta fokus untuk terus meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan dalam bidang kesehatan di wilayah Kota Jayapura.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1 Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019

3.1.2 HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) ditujukan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Semakin tinggi nilai HLS berarti kondisi pembangunan sistem pendidikan di wilayah tersebut semakin baik, sebaliknya semakin rendah nilai HLS berarti kondisi pembangunan sistem pendidikan di wilayah tersebut semakin buruk.

HLS Kota Jayapura tahun 2019 mencapai 15 tahun. Hal ini berarti setiap anak berusia 7 (tujuh) tahun yang bersekolah atau memasuki dunia pendidikan, diharapkan akan terus bersekolah sampai 15 tahun ke depan atau setiap anak diharapkan dapat bersekolah sampai pada jenjang pendidikan Diploma. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Kota Jayapura sudah cukup baik, dimana standar maksimum atau idela diharapkan seorang anak dapat bersekolah adalah selama 18 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik
Gambar 3.2 Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019

HLS Kota Jayapura tahun 2019 mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (14,99 tahun). Apabila HLS Kota Jayapura dibandingkan dengan Provinsi Papua nilainya sudah lebih tinggi yaitu 11,05 tahun.

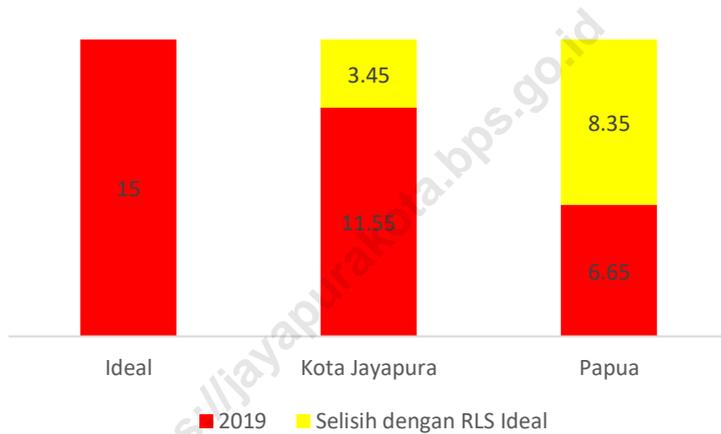
Pemerintah Daerah Kota Jayapura harus mempertahankan serta aktif melakukan peningkatan kualitas pendidikan dan berkelanjutan dengan cara mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan, guna meningkatkan daya saing untuk mencapai hidup sejahtera bagi penduduk Kota Jayapura agar mampu bersaing dengan wilayah lain di Indonesia.

3.1.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah di suatu wilayah, maka diharapkan tingkat pendidikan yang ditempuh penduduknya semakin baik, sebaliknya semakin rendah rata-rata lama sekolah berarti tingkat pendidikan yang ditempuh penduduknya semakin buruk. RLS juga dapat digunakan untuk melihat apakah program Wajib Belajar 9 tahun yang ditetapkan pemerintah telah tercapai.

RLS Kota Jayapura tahun 2019 mencapai 11,5 tahun, dimana rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah Kota Jayapura telah menempuh pendidikan selama 11 sampai 12 tahun, atau

setara dengan kelas 2 sampai 3 SLTA/ sederajat. Oleh karena itu dapat disimpulkan program Wajib Belajar 9 tahun yang ditetapkan pemerintah telah terealisasi dan terlaksana dengan baik di Kota Jayapura. Nilai RLS Kota Jayapura mendekati nilai standar maksimum atau ideal yaitu selama 15 tahun.

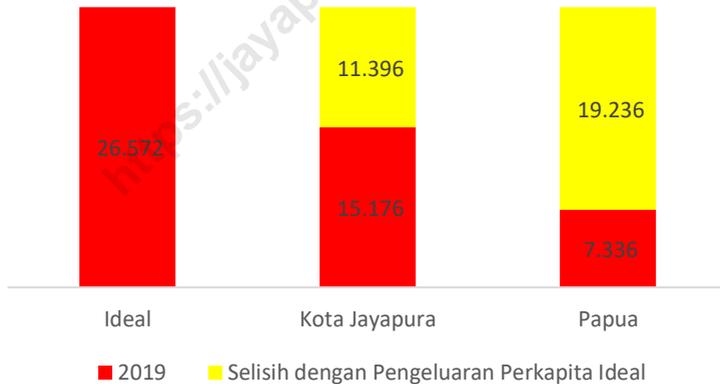


Sumber : Badan Pusat Statistik
 Gambar 3.3 Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019

Pemerintah Daerah Kota Jayapura tetap harus terus aktif melakukan peningkatan kualitas pendidikan dan berkelanjutan di wilayahnya dengan cara menggalakkan program wajib belajar 12 tahun agar kualitas pendidikan dan daya saing semakin meningkat untuk mencapai hidup sejahtera bagi penduduk Kota Jayapura.

3.1.4 PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

Rata-rata pengeluaran per kapita merupakan komponen dalam penyusunan dimensi standar hidup layak yang dihitung dengan metode Rao. Dari hasil penghitungan, diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan untuk penduduk Kota Jayapura tahun 2019 sebesar Rp 15.176.000. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan tahun 2018 (Rp 14.922.000). Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Jayapura sudah lebih tinggi dari Provinsi Papua yaitu sebesar Rp 7.336.000.



Sumber: Badan Pusat Statistik
Gambar 3.4 Pencapaian Aktual Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2019 (000 Rp)

Peningkatan pembangunan di bidang ekonomi baik dari segi laju pertumbuhan maupun pemerataan hasil pembangunan ekonomi di wilayah Kota Jayapura perlu dilakukan serta diutamakan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan penghidupan yang layak bagi penduduk di wilayah Kota Jayapura.

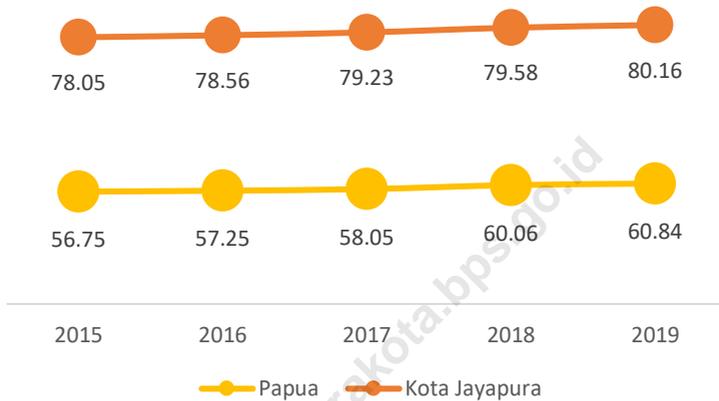
3.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA JAYAPURA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pada daerah tersebut. Perkembangan angka IPM, menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja pemerintah daerah dalam hal pembangunan manusia.

Berdasarkan keseluruhan ketiga indikator penyusun IPM yang telah dibahas pada bab sebelumnya diperoleh angka IPM Kota Jayapura tahun 2019 sebesar 80,16. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,58. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan manusia di Kota Jayapura.

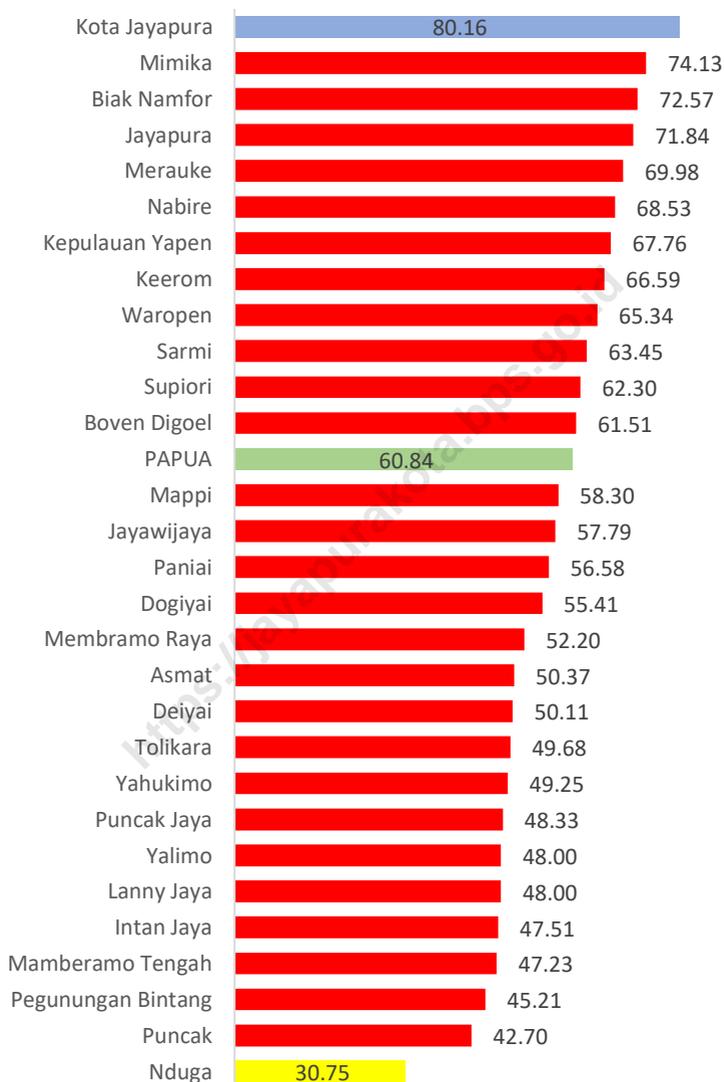
Pencapaian angka IPM Kota Jayapura terus meningkat selama periode tahun 2011-2019, dari 76,97 pada 2011 menjadi 80,16 pada 2019. Pencapaian IPM Kota Jayapura juga lebih tinggi

jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Papua pada tahun 2011 yaitu 55,01 menjadi 60,84 pada tahun 2019.



Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Tahun 2015-2019

Dibandingkan dengan 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, peringkat IPM Kota Jayapura tahun 2019 berada pada urutan pertama. Peringkat terakhir IPM dengan capaian sebesar 29,42 adalah Kabupaten Nduga dan IPM Provinsi Papua memiliki capaian sebesar 60,06. Dengan kata lain tingkat pencapaian pembangunan manusia Kota Jayapura lebih baik dibandingkan pencapaian kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Papua. Selain itu, capaian IPM Kota Jayapura sudah termasuk dalam kategori tinggi dengan capaian $70 \leq \text{IPM} \leq 80$.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Tahun 2019

3.3 KECEPATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA JAYAPURA

Pengukuran kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Nilai pertumbuhan menunjukkan perbandingan antar capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya (IPM = 100), sebaliknya semakin rendah nilai pertumbuhannya maka semakin lambat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimumnya.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM Kota Jayapura, Tahun 2015-2019

Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM
(1)	(2)	(3)
2015	78,05	0,24
2016	78,56	0,65
2017	79,23	0,85
2018	79,58	0,44
2019	80,16	0,73

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan IPM tahun 2019 sebesar 0,73 lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,44. Hal ini menunjukkan pertumbuhan IPM tahun 2019 menjadi lebih cepat untuk mencapai nilai IPM maksimal.

BAB IV ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 INDIKATOR KEPENDUDUKAN

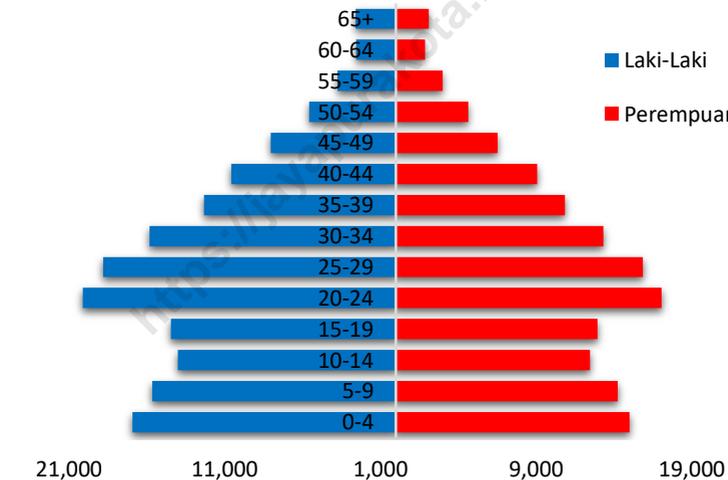
Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan selama berjalannya proses pembangunan. Penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas serta pengarahan mobilitas penduduk harus dipantau dan diarahkan dengan harapan keberhasilan pembangunan dapat tercapai.

4.1.1 JUMLAH PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA

Jumlah penduduk Kota Jayapura tahun 2019 adalah 300.192 jiwa, yang terdiri dari 161.155 laki-laki dan 139.037 perempuan dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 70.655 rumah tangga. Piramida penduduk pada Gambar 4.1 memperlihatkan sebaran penduduk di Kota Jayapura menurut kelompok umur. Penduduk paling banyak terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 37.179 jiwa. Sebagai Pusat Pendidikan dan Perekonomian di Provinsi Papua, Kota Jayapura memiliki daya tarik bagi kelompok usia 20-24 tahun untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan

sekolah di jenjang perguruan tinggi. Sehingga, sangat wajar jika penduduk Kota Jayapura terbanyak pada kelompok usia ini.

Jika dilihat dari struktur piramida penduduk, Kota Jayapura merupakan wilayah dengan struktur penduduk usia produktif/angkatan kerja (15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia tidak produktif/ bukan angkatan kerja (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun). Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*).



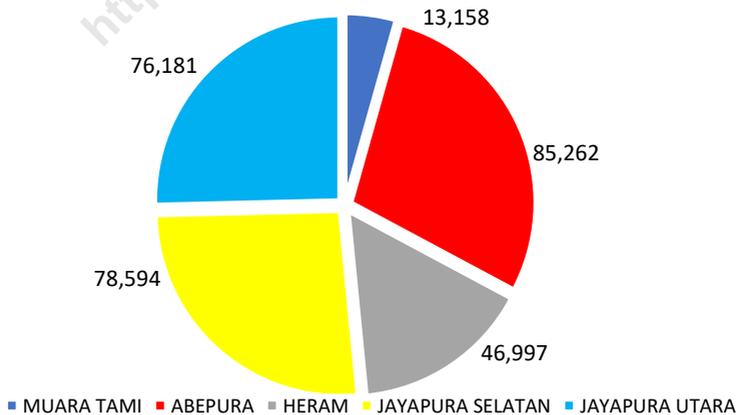
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.1 Piramida Penduduk Kota Jayapura, Tahun 2019

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah

penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan Kota Jayapura yaitu sebesar 44,91 yang artinya, secara rata-rata untuk setiap 100 penduduk usia tidak produktif terdapat 45 penduduk usia produktif. Atau dengan kata lain, rata-rata 1 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 2 orang penduduk usia tidak produktif. Angka ini dapat memberikan informasi potensi penduduk secara kuantitatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gambaran distribusi penduduk pada setiap distrik di Kota Jayapura dapat dilihat pada gambar 4.2. Jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Abepura sejumlah 85.262 jiwa kemudian diikuti Distrik Jayapura Selatan dengan jumlah penduduk 78.594 jiwa. Sedangkan distrik dengan jumlah penduduk terkecil adalah Distrik Muara Tami 13.158 jiwa.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Kota Jayapura menurut Distrik, Tahun 2019

4.1.2 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \left[\left(\frac{P_n}{P_0} \right)^{1/n} - 1 \right] \times 100\%$$

Dimana:

P_n : Jumlah penduduk pada tahun ke-n

P_0 : Jumlah penduduk pada tahun dasar

n : Jumlah tahun antara tahun dasar dan tahun ke-n

r : Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun

Laju pertumbuhan penduduk Kota Jayapura tahun 2019 adalah 0,81 persen dibandingkan dengan tahun 2018.

4.1.3 RASIO JENIS KELAMIN (SEX RATIO)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Rumus yang digunakan adalah :

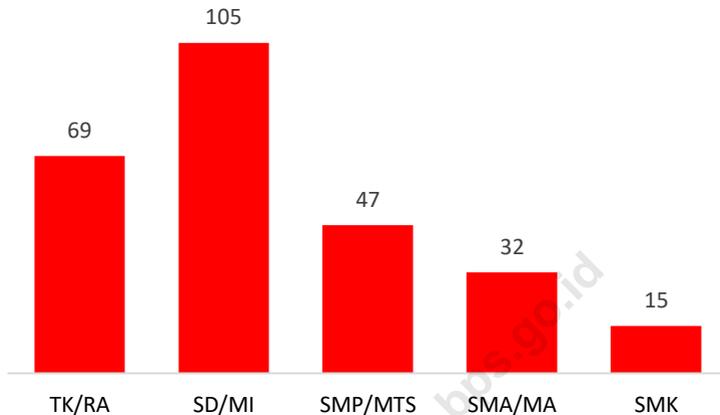
$$\text{Sex Ratio} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

Rasio jenis kelamin Kota Jayapura tahun 2019 yaitu 115,90 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 115 penduduk laki-laki atau pada setiap 10 perempuan terdapat 11 orang laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 11 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Jayapura.

4.2 INDIKATOR PENDIDIKAN

4.2.1 JUMLAH SEKOLAH, GURU DAN MURID

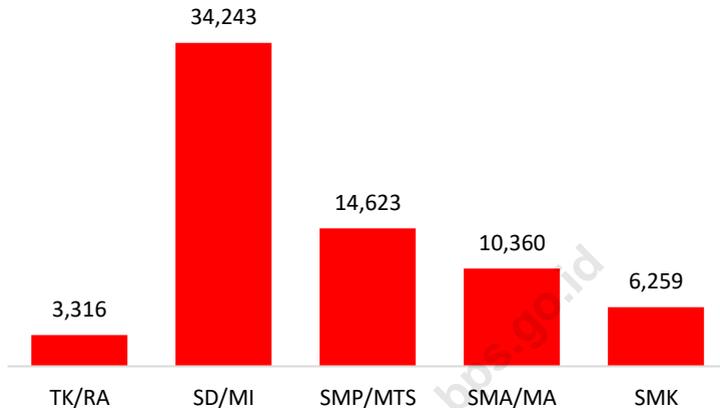
Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa diharuskan mengikuti sistem belajar mengajar yang berjenjang. Gambar 4.3 merupakan jumlah sekolah yang ada di Kota Jayapura menurut jenjang pendidikannya.



Sumber Kemendikbud, Tahun 2019

Gambar 4.3 Jumlah Sekolah di Kota Jayapura menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2019

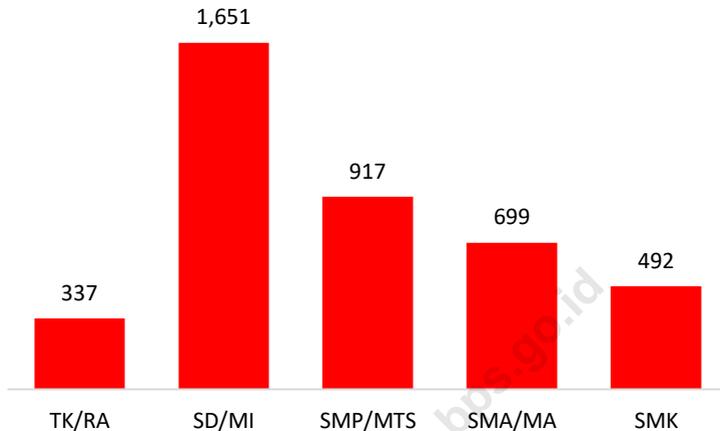
Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah gedung sekolah paling banyak ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu sebanyak 105 gedung sekolah dan yang paling sedikit adalah jumlah gedung SMK/SMTK yaitu 15 gedung sekolah. Untuk melihat idealisme penggunaan gedung sekolah, perlu dibarengi dengan melihat jumlah murid dan guru pada masing-masing jenjang sekolah. Data jumlah murid tersaji pada gambar 4.4 dan data jumlah guru tersaji pada gambar 4.5.



Sumber Kemendikbud, Tahun 2019

Gambar 4.4 Jumlah Murid di Kota Jayapura menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2019

Sejalan dengan jumlah gedung sekolah di Kota Jayapura, jumlah murid pada jenjang SD/MI merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Sementara itu, jumlah guru menurut jejanjang pendidikan sekolah berdasarkan gambar 4.5 memiliki pola yang senada dengan jumlah gedung sekolah dan jumlah sekolah. Diantara jenjang pendidikan yang lain, jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI adalah yang terbanyak yaitu sejumlah 1.651 orang guru dan yang paling sedikit ada jumlah guru TK/RA yaitu sejumlah 337 orang guru.



Sumber: Kemendikbuk, Tahun 2019

Gambar 4.5 Jumlah Guru di Kota Jayapura menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2019

Lebih sedikitnya jumlah guru SMP dibandingkan jumlah guru SD berakibat pada besarnya nilai rasio murid terhadap guru pada jenjang SD. Data rasio murid terhadap guru dan data pendukung lainnya tersaji pada tabel 4.1. berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota pasal 2 ayat (2)a5 menyatakan bahwa setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik. Sementara itu, menurut data pada tabel 4.1 rasio murid terhadap guru SD/MI di Kota Jayapura mencapai 20 orang. Nilai rasio ini jauh berada di bawah standar ideal yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya berimbang pada kualitas murid itu sendiri. Pemerintah daerah telah menaruh perhatian lebih terkait kurangnya guru pada setiap jenjang pendidikan di Kota Jayapura sehingga telah mencapai jumlah ideal untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang.

Tabel 4.1 Rata-rata Guru dan Murid terhadap Sekolah serta Ratio Murid terhadap Guru menurut Pendidikan di Kota Jayapura, 2019

Pendidikan	Rata-rata Guru Per Sekolah	Rata-rata Murid Per Sekolah	Ratio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1. TK	4,88	48,06	9,84
2. SD/MI	15,72	326,12	20,74
3. SLTP/MTS	19,51	311,13	15,95
4. SMA/MA	21,84	323,75	14,82
5. SMK	32,80	417,27	12,72

Sumber: Kota Jayapura dalam Angka 2020

4.2.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Salah satu indikator pendidikan adalah APS (Angka Partisipasi Sekolah). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non

Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS terbagi dalam kelompok usia sekolah. Dalam hal ini, APS dihitung untuk kelompok usia sekolah 7-12 tahun atau setara dengan rata-rata usia penduduk yang sekolah di jenjang SD/Sederajat, 13-15 tahun untuk jenjang SMP/Sederajat, dan 16-18 tahun untuk jenjang SMA/Sederajat. Gambar 4.6 menggambarkan APS Penduduk Kota Jayapura menurut jenis kelamin.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{APS } 7 - 12 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 7 - 12 \text{ tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7 - 12 \text{ tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS } 13 - 15 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 13 - 15 \text{ tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia } 13 - 15 \text{ tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS } 16 - 18 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 16 - 18 \text{ tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia } 16 - 18 \text{ tahun}} \times 100\%$$

APS Kota Jayapura tahun 2019 tertinggi berada pada kelompok usia SMP/Sederajat atau usia 13-15 tahun yaitu sebesar 97,94 persen. Hal ini berarti bahwa sebanyak 97,94 persen dari total penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun di Kota Jayapura terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah baik pada jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, maupun SMA/Sederajat. Sementara itu, partisipasi sekolah yang terendah adalah pada kelompok usia SMA/Sederajat atau 16-18 tahun yaitu 92,78 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi pemerintah daerah

mengingat masih terdapat penduduk yang belum/tidak bersekolah lagi.



Sumber: Susenas 2019, BPS

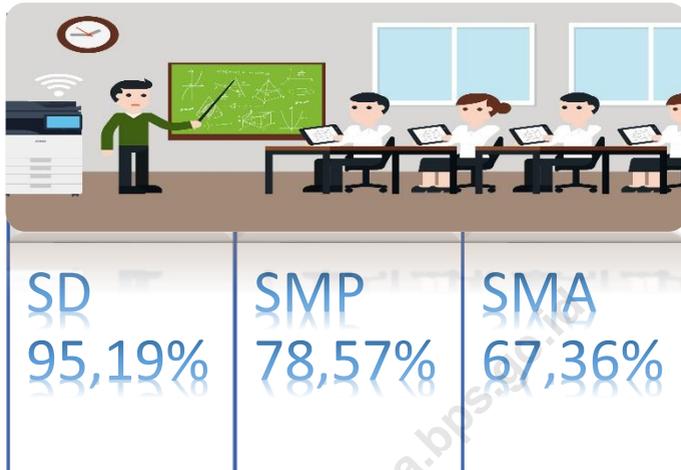
Gambar 4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2019

4.2.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka ini menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM Kota Jayapura Tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 95,19 persen penduduk di Kota Jayapura yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/Sederajat, sekitar 78,57 persen penduduk di Kota Jayapura yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMP/Sederajat, dan sekitar 67,36 persen penduduk di Kota Jayapura yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/Sederajat.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM penduduk laki-laki pada kelompok usia 7-12 tahun (APM SD) dan kelompok usia 13-15 tahun (APM SMP) memiliki nilai lebih tinggi dibanding APM penduduk perempuan. Untuk APM SMA, nilai APM penduduk laki-laki lebih rendah jika dibandingkan dengan APM penduduk perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2019, lebih banyak penduduk perempuan kelompok usia 13-15 tahun yang sekolah tepat waktu pada jenjang yang bersesuaian (SMA/ sederajat).

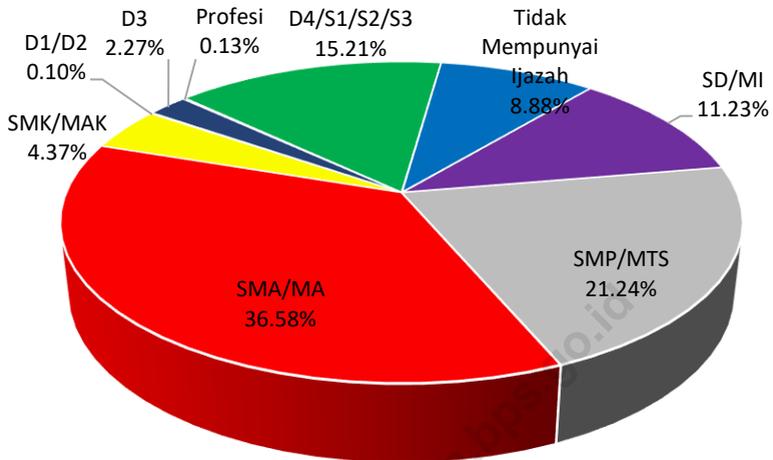


Sumber: BPS

Gambar 4.7 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2017

4.2.4 TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktifitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktifitas seseorang dalam bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Gambaran mengenai distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada gambar 4.8.



Sumber: BPS

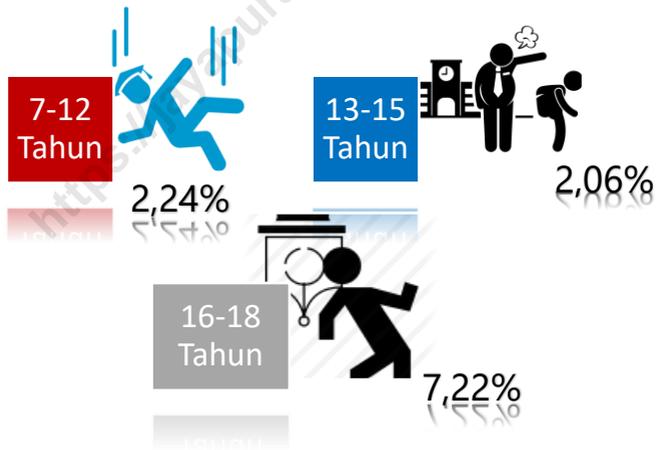
Gambar 4.8 Sebaran Penduduk Kota Jayapura Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2019

4.2.5 ANGKA PUTUS SEKOLAH (APTS)

APTS merupakan proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun.

Gambar 4.9 menyajikan data APTS Kota Jayapura dirinci menurut jenis kelamin. APTS kelompok usia 13-15 Tahun merupakan APTS terendah diantara kelompok usia lainnya yaitu

sebesar 2,06 persen. Artinya, terdapat 2 penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi dari 100 penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Sementara itu, APTS tertinggi berada pada kelompok usia 16-18 tahun yaitu 7,22 persen. Artinya untuk setiap 100 penduduk usia 16-18 tahun yang pernah/sedang bersekolah, terdapat 7 orang penduduk usia 16-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi. Terdapat beberapa faktor terkait tingginya APTS pada kelompok usia 16-18 tahun diantaranya faktor biaya pendidikan, sosial, sarana dan prasarana pendidikan, dll.



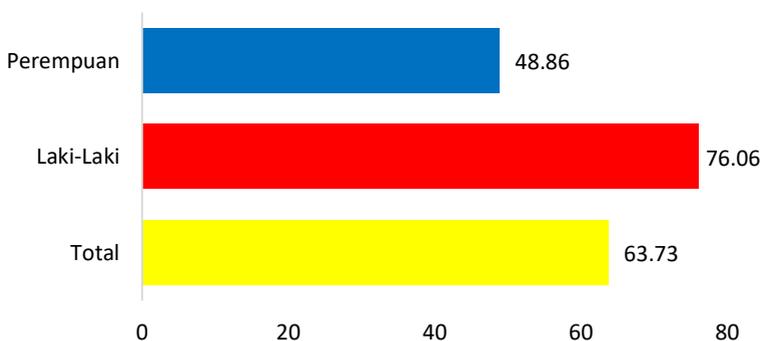
Sumber: BPS

Gambar 4.9 Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Jayapura menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2019

4.3 INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

4.3.1 ANGKATAN KERJA

Kajian mengenai ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting sebab bekerja tidak hanya berarti untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu, ketenagakerjaan juga merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan kemudian selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

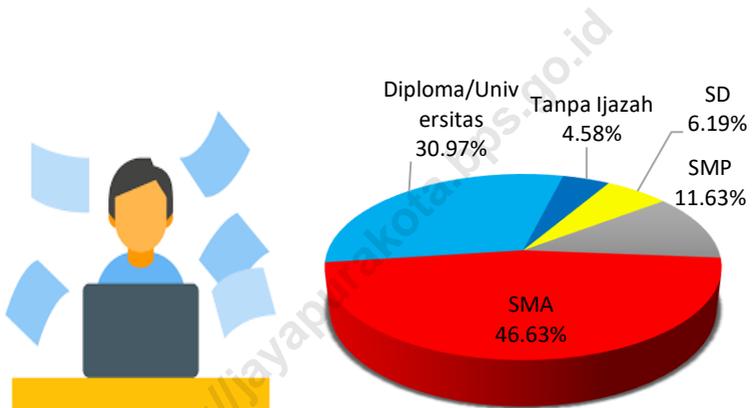


Gambar 4.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jayapura Dirinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

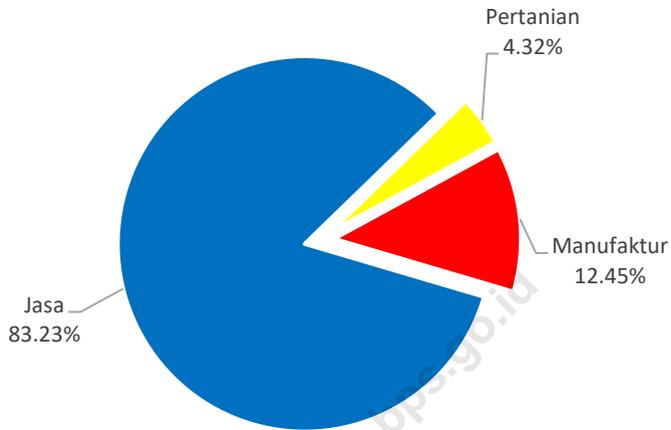
Gambar 4.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 persentase penduduk yang sudah aktif dalam perekonomian (angkatan kerja) adalah 63,73 persen dari penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun). Persentase tersebut merupakan ukuran tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja Kota Jayapura cukup besar yaitu lebih dari 50 persen dari total penduduk usia kerja sehingga harus diimbangi dengan permintaan tenaga kerja yang besar pula agar angka pengangguran dapat lebih ditekan. Jika dianalisa menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, Kota Jayapura memiliki potensi angkatan kerja laki-laki yang lebih banyak daripada angkatan kerja perempuan. TPAK yang lebih dari 50 persen ini harus diimbangi dengan kualitas agar mampu mengisi pasar-pasar tenaga kerja. TPAK yang besar dapat menjadi modal dalam pembangunan jika diimbangi dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri, sebaliknya akan menjadi beban dalam pembangunan jika tenaga kerja yang dimiliki tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

4.3.2 PENDUDUK BEKERJA

Bila dibedakan menurut tingkat pendidikan, penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja terbanyak adalah lulusan SMA yaitu sebesar 59.960 orang atau sekitar 46,63 persen dari total penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.



Gambar 4.11 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2019



Gambar 4.12 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019

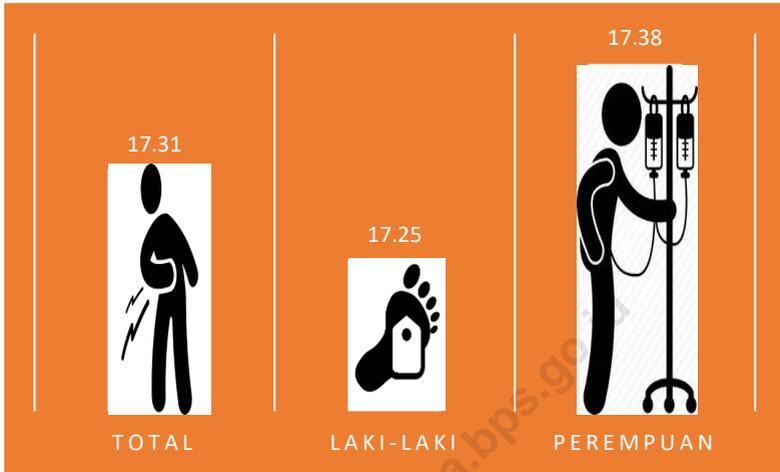
Persentase pekerja ditinjau menurut lapangan pekerjaan utama seperti dilihat pada gambar 4.12 menunjukkan bahwa distribusi sektor penduduk bekerja di Kota Jayapura bertumpu pada kesempatan kerja di sektor jasa dengan nilai proporsi lebih dari 80 persen. Pada tahun 2019, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 4,32 persen. Sementara itu, sebanyak 12,45 persen penduduk bekerja di sektor industri. Mengingat Kota Jayapura sebagai Ibukota Propinsi Papua merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, maka sektor-sektor tersebut memberikan peluang terbesar diantara sektor-sektor yang ada untuk menyerap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan.

4.4 INDIKATOR KESEHATAN

4.4.1 ANGKA MORBIDITAS (AM)

AM (Angka Morbiditas)/Angka Kesakitan/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan bermanfaat untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat yang bersangkutan. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil olahan data Susenas 2019, Angka Morbiditas Kota Jayapura adalah 17,31 persen yang artinya bahwa dari setiap 100 jiwa penduduk di Kota Jayapura, terdapat sekitar 17 jiwa yang memiliki keluhan kesehatan pada tahun 2019. Agar lebih tepat dan fokus dalam pengambilan kebijakan, pada Gambar 4.13 tersaji data persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dirinci menurut daerah tempat tinggal. Persentase penduduk mengalami kesakitan terbesar berada di daerah perdesaan yaitu sebesar 18,13 persen.



Sumber: BPS

Gambar 4.13 Angka Kesakitan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kota Jayapura, 2019

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi.

4.5 INDIKATOR KEMISKINAN

4.5.1 GARIS KEMISKINAN

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2) seperti yang tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Indikator Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2015-2019

Indikator Kemiskinan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (GK)	Rp763.326,-	Rp805.746,-	Rp849.496,-	Rp944.479,-	Rp992.610,-
Jumlah Penduduk Miskin (000)	34,34	34,48	33,51	33,74	34,42
Persentase Penduduk Miskin (P ₀)	12,22	12,06	11,46	11,37	11,49
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	1,9	1,63	3,20	2,55	2,27
Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	0,47	0,45	1,25	0,89	0,76
Gini Ratio	0,347	0,283	0,317	0,308	0,301

Sumber: BPS

Garis kemiskinan Kota Jayapura dari tahun 2015 terus meningkat seiring dengan peningkatan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2015 garis kemiskinan Kota Jayapura adalah sebesar Rp763.326,- naik menjadi Rp992.610,- pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin di Kota Jayapura perlahan menurun dari tahun ke tahun walaupun jumlah penduduk miskin berfluktuasi. Nampak bahwa pada tahun 2015 terdapat 12,22 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nilai ini menurun menjadi 11,49 persen pada tahun 2019.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kota Jayapura Tahun 2019 sebesar 80,16 atau naik 0,58 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 0,73.

2. Indikator Kependudukan

- Tahun 2019 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,81 persen dibandingkan tahun 2017.
- Jumlah penduduk Kota Jayapura Tahun 2019 adalah sejumlah 300.192 jiwa, yang terdiri dari 161.155 laki-laki dan 139.037 perempuan dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 70.655.
- Jumlah rumah tangga di Kota Jayapura tahun 2019 adalah 70.655 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 4 orang.
- Berdasarkan hasil penghitungan *Dependency Ratio*, secara rata-rata 1 orang penduduk usia produktif menanggung 2 sampai 3 orang penduduk usia tidak produktif.

3. Indikator Pendidikan

- Secara total, APS Kota Jayapura tahun 2019 tertinggi berada pada kelompok usia SMP/Sederajat atau usia 13-15 tahun yaitu sebesar 97,94 persen dan yang terendah

adalah pada kelompok usia SMA/Sederajat atau 16-18 tahun yaitu 92,78 persen.

- Status pendidikan penduduk 5 tahun ke atas pada umumnya adalah sudah tidak bersekolah

4. Indikator Ketenagakerjaan

- Kota Jayapura memiliki potensi angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada angkatan kerja perempuan.
- Lebih dari 80 persen penduduk yang bekerja di Kota Jayapura bekerja di sektor jasa.

5. Indikator Kesehatan

AM (Angka Morbiditas) Kota Jayapura Tahun 2018 adalah 17,31 persen yang artinya bahwa dari setiap 100 jiwa penduduk di Kota Jayapura, terdapat sekitar 17 jiwa penduduk yang memiliki keluhan kesehatan.

6. Indikator Kemiskinan

Pada tahun 2018 garis kemiskinan Kota Jayapura adalah sebesar Rp944.479,- naik menjadi Rp992.610,- pada tahun 2019. Saran yang diberikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura. Pelaksanaan pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia terutama terkait dengan peningkatan daya beli penduduk Kota Jayapura.

Adapun saran berdasar temuan permasalahan adalah sebagai berikut:

- Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah Kota Jayapura sebaiknya memprioritaskan pengembangan wilayah kota di daerah Muara Tami maupun kelurahan maupun kampung yang berbatasan dengan distrik tersebut.
- Perlu adanya penambahan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
- Untuk menghindari adanya putus sekolah, diharapkan peran pemerintah untuk dapat menekan biaya pendidikan.
- Perlu adanya optimalisasi program ekstrakurikuler maupun penanaman jiwa wirausaha sejak dini sehingga mereka siap terjun ke lapangan kerja.
- Memperluas kesempatan kerja dengan mengoptimalkan potensi Kota Jayapura untuk menarik investor, memberikan kredit lunak, dan menumbuhkan jiwa berwiraswasta dalam diri masyarakat.
- Mengaktifkan organisasi wanita dan posyandu sebagai sarana peningkatan kreativitas dan kemampuan ibu dalam menciptakan lapangan usaha serta dapat meningkatkan kualitas fisik ibu dan anak.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAYAPURA
Jl. Dewi Sartika, No. 2, Abepura, Jayapura
Telp./Faks. : (0967) 581336
Email: bps9471@bps.go.id
Homepage: <http://jayapurakota.bps.go.id>

